

2025

RENCANA KERJA

LAPORAN BY:

BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

**DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani. No. 170 Telp (0264) Fax. 204038 Kode Pos 41113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 000.7.2.5/707-sekre/2024

Tentang

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perindustrian;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupten Purwakarta Tahun 2023.
23. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menjadi pedoman Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



DAN LABBURAHMANN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19710713 199901 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025s secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja ini dapat mendeskripsikan kondisi aktual dan akselerasi pencapaian kinerja di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Demikian, semoga dokumen Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini dapat Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat.

Purwakarta, 30 Juli 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



DAN LABDURAHMAN, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP.19710713 199901 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	35
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2. Arah Kebijakan Nasional.....	56
3.3. Tujuan dan Sasaran.....	58
3.4. Program dan Kegiatan.....	59
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
	79
BAB V PENUTUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Penyusunan Renja dengan berpedoman pada Renstra Tahun 2024-2026, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (Renja) selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024 – 2026.

Renja Dinas, Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, yang disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah dan regulasi kebijakan nasional yang harus dilaksanakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja; dan
6. Penetapan Renja.

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang koperasi usaha kecil, dan menengah, perdagangan dan perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan dan Perindustrian;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
4. Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian secara Adapun Tugas rinci.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta di Pimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 2 (Dua) Sub bagian, 4 (empat) Kepala Bidang dan 13 Jabatan Fungsional Yaitu ;

1. Kepala Bidang Koperasi ;
2. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
3. Kepala Bidang Perdagangan; dan

4. Kepala Bidang Perindustrian
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Jum'at dan Ki-Sunda Leuwipanjang;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wanayasa
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Citeko Plered,
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan sentra Keramik, dan;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal; yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi langsung Kepala Dinas.
6. Jabatan Fungsional

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun

2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 selaras dengan maksud dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target

kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2025;
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2024 (tahun berjalan) Kabupaten Purwakarta

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	B	A	128%	A	128	128%
						Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	0	90,21	80	90,21	113%			
2	17	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	7	7	7	7	100%	5	19	271,43%
2	17	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5	5	5	100%	2	12	300,00%
2	17	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
2	17	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	0	2	200,00%
2	17	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%

2	17	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	0	2	200,00%
2	17	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
2	17	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	3	2	67%	2	6	150,00%
2	17	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	3	3	3	3	100%	3	9	300,00%
2	17	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	100%	12	36	300,00%
2	17	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	100%	2	4	400,00%
2	17	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan	4	4	4	4	100%	2	10	250,00%
2	17	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	300,00%
2	17	001	2.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
2	17	001	2.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	1	1	4	1	25%	1	3	300,00%
2	17	001	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2	2	1	1	100%	2	5	250,00%
2	17	001	2.04	001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah	1	0	1	0	0%	1	1	100,00%
2	17	001	2.04	002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0	1	0	1	#DIV/0!	0	0	0,00%
2	17	001	2.04	003	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
2	17	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	3	3	3	3	100%	0	6	200,00%
2	17	001	2.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	1	1	1	100%	0	0	0,00%
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapan	0	143	120	143	0%	0	286	#DIV/0!
2	17	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	100%	0	2	200,00%

2	17	001	2.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	0	0	0%	0	0	0,00%
2	17	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	0	5	0	0%	0	0	0,00%
2	17	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8	8	8	8	100%	0	16	200,00%
2	17	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	22	1	22	2200%	1	1	100,00%
2	17	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	3	1	3	300%	1	1	100,00%
2	17	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga	1	5	1	5	500%	1	1	100,00%
2	17	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1	13	4	13	325%	1	1	100%
						Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	1	100		100	#DIV/0!			
2	17	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1	8	1	8	800%	1	1	100,00%
2	17	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
2	17	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
2	17	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatusahaan Arsip	2	1	1	1	100%	1	3	150,00%
2	17	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	300,00%
2	17	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	3	1	3	300%	1	1	100,00%
2	17	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0%	0	0	#DIV/0!
2	17	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1	3	0	3	#DIV/0!	1	1	100,00%

2	17	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3	3	3	3	100%	3	9	300,00%
2	17	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat Menyurat	1	2	1	2	200%	3	7	700,00%
2	17	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	4	1	4	400%	3	11	1100,00%
2	17	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	53	11	14	14	100%	3	28	52,83%
2	17	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	5	4	4	100%	4	13	325,00%
2	17	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	6	5	5	100%	7	18	257,14%
2	17	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	2	10	10	100%	3	15	500,00%
2	17	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	4	4	4	100%	3	11	366,67%
2	17	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	1	1	100%	3	7	233,33%
2	17	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1	0	0	0%	0	1	0,00%
2	17				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	87,5	0	0	0	#DIV/0!	87,5	87,5	100,00%
2	17				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan	35	0	0	0	#DIV/0!	35	35	100,00%
2	17				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	35	0	0	0	#DIV/0!	35	35	100,00%
2	17	003			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	89,7	150	150	150	100%	89,7	389,7	434,45%
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	505	1	1	1	100%	505	507	100,40%

2	17	003	2.01	001	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	506	150	150	150	100%	506	806	159,29%
2	17	004			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	89,7	150	150	150	100%	89,7	389,7	434,45%
2	17	004	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang di nilai kesehatannya	505	2	2	2	100%	505	509	100,79%
2	17	004	2.01	001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0	0	150	0	0%	0	0	0,00%
2	17	004	2.01	002	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	12	10	10	10	100%	12	32	266,67%
2	17	005			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	72,82	150	150	150	100%	72,82	372,82	511,97%
2	17	005	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	150	1	1	1	100%	150	152	101,33%
2	17	005	2.01	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150	150	150	150	100%	150	450	300,00%
2	17	007			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	85,23	0	0	0	0%	85,23	85,23	100,00%
						Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	56,46	0	0	0	0%	56,46	56,46	100,00%
						Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	75,23	0	0	0	0%	75,23	75,23	100,00%
						Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	2,53	0	0	0	0%	2,53	2,53	100,00%
						Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	57,9	0	0	0	0%	57,9	57,9	100,00%
						Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	0	60	60	60	100%	0	120	0,00%
						Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wirawasta Yang Profesional	0	40	50	40	80%	0	80	0,00%
						Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	0	100	150	100	67%	0	200	0,00%
						Persentase UMKM Yang Terbina	0	60	60	60	100%	0	120	0,00%
						Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	0	40	50	40	80%	0	80	0,00%

2	17	007	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah fasilitasi UKM dalam pemberdayaan	775	5	2	5	250%	775	785	101,29%
2	17	007	2.01	001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pameran Produk UMKM Purwakarta	0	0	0	0	0%	0	0	0,00%
						Jumlah Pemeliharaan dan Pemutahiran Data SIM UKM	0	0	0	0	0%	0	0	0,00%
						Jumlah Pelatihan UKM	0	2	0	2	#DIV/0!	0	0	0,00%
2	17	007	2.01	002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Pembinaan Bagi Komunitas UKM	0	0	50	0	0%	0	0	0%
						Jumlah Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan, Soveninir dan Makanan Khas Purwakarta	0	0		0	0%			
						Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibina	0	1		1	#DIV/0!			
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50	0	0	0	0%	50	50	100,00%
2	17	007	2.01	003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Usaha Mikro Dalam Mendapatkan Perizinan	700	25	30	25	83%	700		
2	17	007	2.01	004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelatihan Teknik Substantif UKM	0	1	0	1	#DIV/0!	0	0	0,00%
2	17	007	2.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	1	0	1	#DIV/0!	0	0	0,00%
					Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	25	0	0	0	#DIV/0!	25	25	100,00%
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150	0	0	0	#DIV/0!	150	150	100,00%
2	17	008			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	0	50	50	50	100%	0	100	#DIV/0!
						Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	0	10	10	10	100%	0	20	#DIV/0!
						Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/ BUMD	0	20	20	20	100%	0	40	#DIV/0!
						Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UMKM	0	0	2	0	0%	0	0	#DIV/0!
						Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	0	15	15	15	100%	0	30	#DIV/0!

						Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	0	20	20	20	100%	0	40	#DIV/0!
						Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	0	100	100	100	100%	0	200	#DIV/0!
						Persentase Usaha Mikro dan Kecil	20,56	0	0	0	0%	20,56	20,56	100,00%
						Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	9,63	0	0	0	0%	9,63	9,63	100,00%
2	17	008	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	535	1	1	1	100%	535	537	100,37%
2	17	008	2.01	001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bimbingan Teknis Kepada Pedagang Wisata Kuliner	0	0	300	0	0%	0	0	#DIV/0!
						Forum Group Discussion (FGD)	0	0		0	0%	0	0	#DIV/0!
						Jumlah Workshop Wirausaha Kopi Purwakarta	0	1		1	#DIV/0!	0	2	#DIV/0!
						Pelatihan Keterampilan Teknis Wirausaha Kramik, Tenaga Ahli Putar Handwill	0	0		0	0%	0	0	#DIV/0!
						Pembinaan/Pengembangan/Promosi Warung Online	0	0		0	0%	0	0	#DIV/0!
						Pembuatan Branding Pusat Oleh-Oleh Purwakarta	0	0		0	0%	0	0	#DIV/0!
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	240	0	0	0	0%	240	240	100,00%
3	30	002			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	0	700	300	700	233%	0	1400	#DIV/0!
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	95,32	0	0	0	0%	95,32	95,32	100,00%
						Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	100	0	0	0	0%	100	100	100,00%
3	30	002	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pengelolaan Pasar Rakyat, PusatPerbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%

3	30	002	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	1	1	1	100%	2	4	200,00%
3	30	002	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	30	002	2.02	001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Data Tanda Daftar Gudang	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	30	002	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
3	30	002	2.06	002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0	1	0	1	#DIV/0!	0	2	#DIV/0!
3	30	002	2.06	003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya P-B2 dan PA-B2 bagi Pelaku Usaha	0	1	0	1	#DIV/0!	0	2	#DIV/0!
3	30				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
3	30				Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
3	30				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
3	30				Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
3	30				Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan SKA	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
3	30				Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	16444	0	0	0	0%	16444	16444	100,00%

3	30	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Purwakarta	100	3	3	3	100%	100	106	106,00%
3	30	003	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	25	1	0	1	#DIV/0!	25	27	108,00%
3	30	003	2.02	002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Diberdayakan	0	75	0	75	#DIV/0!	0	150	#DIV/0!
					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
3	30	004			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor	0	150	50	150	300%	0	300	#DIV/0!
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	95,32	0	0	0	0%	95,32	95,32	100,00%
						Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	100	0	0	0	0%	100	100	100,00%
3	30	004	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	42	2	1	2	200%	42	46	109,52%
3	30	004	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	30	004	2.01	003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah dokumen pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	30	004	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	42	2	2	2	100%	42	46	109,52%
3	30	004	2.02	001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%

3	30	004	2.02	003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	30	004	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	30	004	2.03	003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	30	005			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta	0	80	80	80	100%	0	160	#DIV/0!
						Tingkat Nilai Export bersih	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1	100,00%
						Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	2	0	0	0	#DIV/0!	2	2	100,00%
3	30	005	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	2	2	2	100%	1	5	500,00%
3	30	005	2.01	001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	0	1	50	1	2%	0	2	#DIV/0!
3	30	005	2.01	006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	0	1	0	1	#DIV/0!	0	2	#DIV/0!
3	30	005	2.01		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20	0	0	0	0%	20	20	100,00%
3	30	005	2.01		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	50	0	0	0	0%	50	50	100,00%
3	30	006			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen	0	80	80	80	100%	0	0	0,00%
						Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	64,62	0	0	0	0%	64,62	64,62	100,00%
3	30	006	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	21000	1	1	1	100%	21000	21002	100,01%
3	30	006	2.01	001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Kegiatan Akselerasi Unit Metrologi Legal	0	1	3000	1	0%			

						Jumlah Pemeliharaan Standar UML	0	200		200	#DIV/0!			
						Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana UML	0	1		1	#DIV/0!			
						Jumlah Penunjang Operasional Tera/Tera Ulang	0	4351		4351	#DIV/0!			
						Jumlah Standar UML	0	200		200	#DIV/0!			
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	21000	0	0	0	0%	21000	21000	100,00%
3	30	006	2.01	002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Jumlah Penunjang Operasional Penyuluh Metrologi Legal	0	18	30	18	60%			
						Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0	17		17	#DIV/0!			
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200	0	0	0	0%	200	200	100,00%
3	30	007				Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	0	0	2	0	0%	0	0	#DIV/0!
						Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50	0	0	0	0%	50	50	100,00%
						Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	50	0	0	0	0%	50	50	100,00%
3	30	007	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20	0	1	0	0%	20	20	100,00%
3	30	007	2.01	003	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10	0	50	0	0%	10	10	100,00%
					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10	0	0	0	0%	10	10	100,00%
3	30	007	2.01	003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya sistem dan jaringan informasi perdagangan	0	0	0	0	0%	0	0	0,00%

3	31	002			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	0	100	100	100	100%	0	200	#DIV/0!
						Jumlah Desiminsasi	0	160	100	160	160%	0	320	#DIV/0!
						Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan	0	25	25	25	100%	0	50	#DIV/0!
						Jumlah Perda	0	0	1	0	0%	0	0	#DIV/0!
						Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	60	0	0	0	0%	60	60	100,00%
						Cakupan bina kelompok pengrajin	83,33	0	0	0	0%	83,33	83,33	100,00%
3	31	002	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		4	4	4	100%	0	8	#DIV/0!
3	31	002	2.01	001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0	3	1	3	300%	0	6	#DIV/0!
3	31	002	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Kegiatan Penunjang Potensi Kerajinan dan Unggulan Daerah	0	1	2	1	50%			
						Jumlah Pelatihan Potensi Kerajinan dan Unggulan Daerah	0	1		1	#DIV/0!			
						Jumlah Sumber Daya IKM Yang Mengikuti Pelatihan	0	5		5	#DIV/0!			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
3	31	002	2.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Fasilitas Kemasan Produk Menong	0	9	1	9	900%	0	18	#DIV/0!
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
3	31	002	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Industri Kecil Pedesaan	0	1	2	1	50%	0	2	#DIV/0!
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
3	31	003			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah	0	10	10	10	100%	0	20	#DIV/0!

						Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	0	80	80	80	100%	0	160	#DIV/0!
						Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	20,71	0	0	0	0%	20,71	20,71	100,00%
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	0	0	0	0%	100	100	100,00%
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	0	0	0	0%	100	100	100,00%
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	0	0	0	0%	100	100	100,00%
3	31	003	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	31	003	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Realisasi Produksi terhadap IKM	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pengembangan Diverifikasi Produk IKM	0	7	5	7	140%	0	14	#DIV/0!
						Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
						Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	10	0	0	0	0%	10	10	100,00%

3	31	004	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
3	31	004	2.01	001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0	0	1	0	0%	0	0	#DIV/0!
3	31	004	2.01	002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	1	0	1	#DIV/0!	1	3	300,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kerangka analisis kinerja pelayanan terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui, yaitu data internal dan eksternal. Sedangkan penetapan indikator kinerjanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Tabel T-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi PD	SPM/standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (thn-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn + n)	Tahun 2022 (thn-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn + n)	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Opini	B	B	-	-	A	A	-	-	
2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran			Persentase	80	80	-	-	90,21	102,37	-	-	
3	Jumlah Koperasi yang diawasi			Koperasi	150	150	-	-	150	150	-	-	
4	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya			Koperasi	150	150	-	-	150	150	-	-	
5	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian			Koperasi	150	150	-	-	150	150	-	-	
6	Jumlah Koperasi yang dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya			Koperasi	150	150	-	-	0	-	-	-	
7	Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi			UMKM	60	60	-	-	60	60	-	-	
8	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wirausaha Yang Profesional			UMKM	30	50	-	-	40	50	-	-	
9	Jumlah UMKM yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan			UMKM	100	150	-	-	100	150	-	-	
10	Persentase UMKM yang terbina			UMKM	60	60	-	-	60	60	-	-	
11	Jumlah Wirausaha baru yang dibentuk			UMKM	30	50	-	-	40	50	-	-	
12	Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan			UMKM	50	50	-	-	50	0	-	-	
13	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar			UMKM	10	10	-	-	10	10	-	-	
14	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD			UMKM	20	20	-	-	20	20	-	-	

15	Jumlah Pameran yang diikuti oleh UMKM			UMKM	2	2	-	-	0	20	-	-	
16	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas bantuan			UMKM	15	15	-	-	15	0	-	-	
17	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya			UMKM	20	20	-	-	20	20	-	-	
18	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan			UMKM	100	100	-	-	100	100	-	-	
19	Terfasilitasinya rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan			Dokumen	300	300	-	-	700	300	-	-	
20	Tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan di Kabupaten Purwakarta			Unit	3	3	-	-	3	3	-	-	
21	Terkendalanya harga kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar rakyat, pasar modern dan distributor			Pelaku Usaha	50	50	-	-	150	50	-	-	
22	Peningkatan nilai export di Kabupaten Purwakarta			Pelaku Usaha	80	80	-	-	80	80	-	-	
23	Terciptanya penggunaan produk dan pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta			Even	2	2	-	-	0	2	-	-	
24	Standarisasi produk dalam perlindungan konsumen			Pelaku Usaha	80	80	-	-	80	80	-	-	
25	Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan			Orang	100	100	-	-	100	60	-	-	
26	Jumlah Desiminsasi			Orang	100	100	-	-	160	74	-	-	
27	Jumlah Pelatihan pengembangan desain kemasan			Buah	25	25	-	-	25	25	-	-	
28	Jumlah Perda			Buah	1	1	-	-	0	1	-	-	
29	Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah			Unit Usaha	10	10	-	-	10	10	-	-	
30	Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM			Unit Usaha	30	30	-	-	80	30	-	-	

31	Pengembangan diverifikasi Produk IKM			Buah	5	5	-	-	7	5	-	-	
32	Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan			Persentase	-	-	87,5	90	-	-	87,5	90	
33	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan			Persentase	-	-	89,7	89,8	-	-	89,7	89,8	
34	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas			Persentase	-	-	89,7	89,8	-	-	89,7	89,8	
35	Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian			Persentase	-	-	12	15	-	-	12	15	
36	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian			Persentase	-	-	72,82	73,71	-	-	72,82	73,71	
37	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha			Persentase	-	-	85,23	92,24	-	-	85,23	92,24	
38	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha			Persentase	-	-	56,46	56,93	-	-	56,46	56,93	
39	Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha			Persentase	-	-	75,23	86,45	-	-	75,23	86,45	
40	Tingkat Wirausaha Baru (WUB)			Persentase	-	-	2,53	2,78	-	-	2,53	2,78	
41	Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan			Persentase	-	-	57,9	60,42	-	-	57,9	60,42	
42	Persentase Usaha Mikro dan Kecil			Persentase	-	-	20,56	24,3	-	-	20,56	24,3	
43	Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya			Persentase	-	-	9,63	10,56	-	-	9,63	10,56	
44	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			Persentase	-	-	95,32	96,53	-	-	95,32	96,53	
45	Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan			Persentase	-	-	100	100	-	-	100	100	
46	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia			Persentase	-	-	100	100	-	-	100	100	
47	Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya			Persentase	-	-	100	100	-	-	100	100	
48	Persentase kinerja realisasi pupuk			Persentase	-	-	37	38	-	-	37	38	
49	Tingkat Nilai Export bersih			Persentase	-	-	1	1	-	-	1	1	
50	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang			Persentase	-	-	2	2,94	-	-	2	2,94	

51	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			Persentase	-	-	64,62	80	-	-	64,62	80	
52	Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			Persentase	-	-	50	50	-	-	50	50	
53	Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta			Persentase	-	-	50	50	-	-	50	50	
54	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			Persentase	-	-	60	80	-	-	60	80	
55	Cakupan bina kelompok pengrajin			Persentase	-	-	83,33	90,48	-	-	83,33	90,48	
56	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten			Persentase	-	-	20,71	21,19	-	-	20,71	21,19	
57	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			Persentase	-	-	100	100	-	-	100	100	
58	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			Persentase	-	-	100	100	-	-	100	100	
59	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota			Persentase	-	-	100	100	-	-	100	100	
60	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			Dokumen	-	-	100	100	-	-	100	100	
61	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan			Kegiatan	-	-	100	100	-	-	100	100	
62	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Predikat	-	-	A	A	-	-	A	A	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan urusan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
2. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Terbatasnya kompetensi SDM UMKM, sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan kurang berkualitas sesuai permintaan pasar;

4. Masih rendahnya serapan resi Gudang;
5. Masih rendahnya pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat;
6. Masih ditemukannya kasus peredaran barang rusak/kadarluarsa, dan produk makanan dengan bahan berbahaya;
7. Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi;
8. Masih rendahnya pelaksanaan pembinaan terhadap sentra industri;
9. Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang memiliki ciri khas/karakter yang membedakan dengan produk dari daerah lain;
10. Dalam penerbitan perijinan usaha industri terjadi ego sektoral antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten;

2.4. Review Terhadap Rancangan awal Renja

Hasil review terhadap rancangan awal Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal Renja tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				17.749.454.970,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				17.749.454.970,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.809.454.970,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.809.454.970,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.809.454.970,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.809.454.970,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	13.836.837.074,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	13.836.837.074,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	173.437.230,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	173.437.230,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	23.437.230,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	23.437.230,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.228.325.676,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.228.325.676,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	10.208.325.676,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	10.208.325.676,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	165.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	165.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	85.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	85.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan	1.075.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan	1.075.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	685.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	685.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	270.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	270.000.000,00	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	220.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	220.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	1.545.074.168,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	1.545.074.168,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	53 Laporan	1.290.074.168,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	53 Laporan	1.290.074.168,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	350.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	350.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	50.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	50.000.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	90,00 Persen	50.000.000,00	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	90,00 Persen	50.000.000,00	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan	45 Unit Usaha	50.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan	45 Unit Usaha	50.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 Unit Usaha	50.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 Unit Usaha	50.000.000,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	89,80 Persen	195.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	89,80 Persen	195.000.000,00	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang diperiksa dan di awasi	506 Unit Usaha	195.000.000,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang diperiksa dan di awasi	506 Unit Usaha	195.000.000,00	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	506 Unit Usaha	195.000.000,00	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	506 Unit Usaha	195.000.000,00	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi yang berkualitas	89,80 Persen	200.000.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi yang berkualitas	89,80 Persen	200.000.000,00	

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang di nilai kesehatannya	506 Unit Usaha	200.000.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang di nilai kesehatannya	506 Unit Usaha	200.000.000,00	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	506 Unit Usaha	100.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	506 Unit Usaha	100.000.000,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	15 Unit Usaha	100.000.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	15 Unit Usaha	100.000.000,00	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	73,71 Persen	471.370.000,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	73,71 Persen	471.370.000,00	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	160 Unit Usaha	471.370.000,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	160 Unit Usaha	471.370.000,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	160 Orang	471.370.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	160 Orang	471.370.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	56,93 Persen	614.668.803,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	56,93 Persen	614.668.803,00	
			Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	2,78 Persen				Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	2,78 Persen		
			Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	86,45 Persen				Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	86,45 Persen		
			Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	92,24 Persen				Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	92,24 Persen		
			Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	60,42 Persen				Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	60,42 Persen		

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah fasilitasi UKM dalam pemberdayaan	830 Unit Usaha	614.668.803,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah fasilitasi UKM dalam pemberdayaan	830 Unit Usaha	614.668.803,00	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	125.000.000,00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	125.000.000,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	750 Unit Usaha	275.000.000,00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	750 Unit Usaha	275.000.000,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	82.168.803,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	82.168.803,00	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	82.500.000,00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	82.500.000,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	160 Orang	50.000.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	160 Orang	50.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	10,56 Persen	441.579.093,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	10,56 Persen	441.579.093,00	
			Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	24,30 Persen				Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	24,30 Persen		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro dengan peningkatan menjadi usaha kecil	1070 Unit Usaha	441.579.093,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro dengan peningkatan menjadi usaha kecil	1070 Unit Usaha	441.579.093,00	

	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1070 Unit Usaha	441.579.093,00	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1070 Unit Usaha	441.579.093,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.940.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.940.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				940.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				940.000.000,00	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	96,53 Persen	100.000.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	96,53 Persen	100.000.000,00	
			Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	100,00 Persen				Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	100,00 Persen		
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	1 Dokumen	20.000.000,00	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	1 Dokumen	20.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	20.000.000,00	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan TDG	1 Dokumen	15.000.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan TDG	1 Dokumen	15.000.000,00	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	15.000.000,00	
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STWP) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	1 Dokumen	20.000.000,00	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STWP) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	1 Dokumen	20.000.000,00	

	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STWP) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	1 Dokumen	20.000.000,00	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STWP) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	1 Dokumen	20.000.000,00	
	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen	10.000.000,00	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan SKA	1 Dokumen	25.000.000,00	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan SKA	1 Dokumen	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	25.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	100,00 Persen	25.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	100,00 Persen	25.000.000,00	

	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola yang di bina	30 Orang	25.000.000,00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola yang di bina	30 Orang	25.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	25.000.000,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	25.000.000,00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase kinerja realisasi pupuk	38,00 Persen	290.000.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase kinerja realisasi pupuk	38,00 Persen	290.000.000,00	
			Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	100,00 Persen				Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	100,00 Persen		
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	42 Komoditi	30.000.000,00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	42 Komoditi	30.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	15.000.000,00	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	15.000.000,00	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	15.000.000,00	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia dan harga	42 Komoditi	215.000.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia dan harga	42 Komoditi	215.000.000,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000,00	

	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000,00	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	1 Dokumen	45.000.000,00	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	1 Dokumen	45.000.000,00	
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	15.000.000,00	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	15.000.000,00	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	15.000.000,00	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	15.000.000,00	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	15.000.000,00	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	15.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	2,94 Persen	200.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	2,94 Persen	200.000.000,00	
			Tingkat Nilai Export bersih	1,00 Persen				Tingkat Nilai Export bersih	1,00 Persen		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran	1 kegiatan	200.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran	1 kegiatan	200.000.000,00	
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	25 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	25 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	55 Produk	100.000.000,00	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	55 Produk	100.000.000,00	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	80,00 Persen	250.000.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	80,00 Persen	250.000.000,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	26000 Unit	250.000.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	26000 Unit	250.000.000,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	26000 Unit	200.000.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	26000 Unit	200.000.000,00	

	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	50.000.000,00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	50.000.000,00	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	60,00 Persen	75.000.000,00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	60,00 Persen	75.000.000,00	
			Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	60,00 Persen				Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	60,00 Persen		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Jenis produk UMKM yang di Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan di Kabupaten	30 Produk	75.000.000,00	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Jenis produk UMKM yang di Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan di Kabupaten	30 Produk	75.000.000,00	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	50.000.000,00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	50.000.000,00	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	25.000.000,00	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	25.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.000.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.000.000.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Cakupan bina kelompok pengrajin	90,48 Persen	800.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Cakupan bina kelompok pengrajin	90,48 Persen	800.000.000,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3 kegiatan	800.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3 kegiatan	800.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	100.000.000,00	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	100.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	600.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	600.000.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen	50.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen	50.000.000,00	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen		
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	100 Persen				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	21,19 Persen				Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	21,19 Persen		

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	50.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	150.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	150.000.000,00	
			Diseminasi, publikasi data informasi dan analisis industri yang dilaksanakan					Diseminasi, publikasi data informasi dan analisis industri yang dilaksanakan			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	150.000.000,00	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	150.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Perencanaan Program/Kegiatan OPD Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian melalui dua macam perencanaan yaitu Bottom Up dan Top Down. Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang telah didahului dengan musrenbang tingkat desa adalah untuk menampung usulan masyarakat yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan di OPD:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Purwakarta

No	Usulan	Lokasi	Masalah	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengembangan UMKM	Sukadami, Wanayasa, Kab. Purwakarta	Penigkatan Kualitas SDM	Jumlah SDM yang dilatih			
2	Pengembangan UMKM	Desa Darangdan, Kab. Purwakarta	UMKM kekurangan sarana prasarana	Jumlah unit usaha			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Kebijakan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah, maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mendukung Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.

Sedangkan dari **7 Agenda Pembangunan Nasional** yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya berfokus pada **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**. Penjabaran dari Agenda Prioritas Pembangunan Nasional diatas yakni :

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

3.2. Arah Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Sektor Koperasi dan UKM

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, serta menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Visi Kementrian Koperasi dan UKM sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional”**, sedangkan Misi Kementrian Koperasi dan UKM adalah Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional.

b. Arah Kebijakan Sektor Perdagangan

Renstra Kementerian perdagangan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan sector perdagangan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Visi Kementrian Perdagangan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian Perdagangan Tahun 2020 – 2024 adalah **“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, sedangkan Misi Kementrian Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri
- b. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan

c. Arah Kebijakan Sektor Perindustrian

Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dan RPJMN 2020 – 2024. Prinsip kebijakan

pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada:

- 1) Peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam pada industri hulu berbasis agro,mineral, serta migas dan batubara dalam rangka penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya
- 2) Peningkatan kapasitas industri melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Alam dan penguasaan teknologi pembangunan industri di seluruh wilayah industri melalui pembangunan pusat pertumbuhan industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra).

3.3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

- Tujuan :
1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat
 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

- SASARAN :
- a. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
 - b. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
 - c. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.4. Program dan Kegiatan

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah OPD dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Untuk penyusunan rencana pelaksanaan program maupun kegiatan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain yaitu :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yaitu “**Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah**” yang kemudian dijabarkan tujuan dan sasaran kinerja.
- b. Proritas yang sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
- c. Pencapaian target kinerja dengan Indikator Kunci Kinerja (IKK) yaitu urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian dengan capaian target yang telah ditentukan.

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, Program prioritas Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan adalah tujuan bersama, Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program-program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja.

Tabel T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PURWAKARTA**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						17.749.454.970,00							17.749.454.970,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.809.454.970,00							15.809.454.970,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						15.809.454.970,00							15.809.454.970,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat			A Predikat	13.836.837.074,00						A Predikat	13.836.837.074,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	173.437.230,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	7 Dokumen	173.437.230,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	23.437.230,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	23.437.230,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	10.228.325.676,00	-		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	3 Dokumen	10.228.325.676,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			12 Orang/bulan	10.208.325.676,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	14 Orang/bulan	10.208.325.676,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kewenangan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	165.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	165.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	85.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-		85.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			5 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	5 Orang	50.000.000,00	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan			8 Kegiatan	1.075.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	8 Kegiatan	1.075.000.000,00	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	25.000.000,00	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	80.000.000,00	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	50.000.000,00	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	685.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	685.000.000,00	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	100.000.000,00	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan			2 Kegiatan	270.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Kegiatan	270.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	220.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan			3 Kegiatan	1.545.074.168,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	3 Kegiatan	1.545.074.168,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	53 Laporan			53 Laporan	1.290.074.168,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	53 Laporan	1.290.074.168,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan			4 Kegiatan	350.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Kegiatan	350.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit			7 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	7 Unit	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			3 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			3 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.10.Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2,	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	91,67 Persen			90,00 Persen	50.000.000,00						91,67 Persen	50.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan	55 Unit Usaha			45 Unit Usaha	50.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	55 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	55 Unit Usaha			45 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	55 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	90,05 Persen			89,80 Persen	195.000.000,00					90,05 Persen	195.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan di awasi	507 Unit Usaha			506 Unit Usaha	195.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	507 Unit Usaha	195.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi													
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	507 Unit Usaha			506 Unit Usaha	195.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	507 Unit Usaha	195.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	90,25 Persen			89,80 Persen	200.000.000,00					90,25 Persen	200.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang di nilai kesehatannya	507 Unit Usaha			506 Unit Usaha	200.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	507 Unit Usaha	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	507 Unit Usaha			506 Unit Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	507 Unit Usaha	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan													
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	18 Unit Usaha			15 Unit Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	18 Unit Usaha	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	74,60 Persen			73,71 Persen	471.370.000,00					74,60 Persen	471.370.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	170 Unit Usaha			160 Unit Usaha	471.370.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	170 Unit Usaha	471.370.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoprasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoprasian	170 Orang			160 Orang	471.370.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	170 Orang	471.370.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	57,39 Persen			56,93 Persen	614.668.803,00						57,39 Persen	614.668.803,00	
			Tingkat Wirusaha Baru (WUB)	3.85Persen			2.78 Persen							3.85Persen		
			Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	100Persen			86.45 Persen							100Persen		
			Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100Persen			92,24 Persen							100Persen		
			Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan /sosialisasi kewirausahaa	63,22 Persen			60,42 Persen							63,22 Persen		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah fasilitasi UKM dalam pemberdayaan	920 Unit Usaha			830 Unit Usaha	614.668.803,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	920 Unit Usaha	614.668.803,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha			50 Unit Usaha	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	50 Unit Usaha	125.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	830 Unit Usaha			750 Unit Usaha	275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	830 Unit Usaha	275.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha			30 Unit Usaha	82.168.803,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	40 Unit Usaha	82.168.803,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	40 Unit Usaha			30 Unit Usaha	82.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	40 Unit Usaha	82.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	170 Orang			160 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	170 Orang	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	11,50 Persen			10,56 Persen	441.579.093,00						11,50 Persen	441.579.093,00	
			Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	28,04Persen			24,30 Persen							28,04Persen		
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro dengan peningkatan menjadi usaha kecil	1605 Unit Usaha			1070 Unit Usaha	441.579.093,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	1605 Unit Usaha	441.579.093,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1605 Unit Usaha			1070 Unit Usaha	441.579.093,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	1605 Unit Usaha	441.579.093,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.940.000.000,00							1.940.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						940.000.000,00							940.000.000,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	97,86 Persen			96,53 Persen	100.000.000,00						97,86 Persen	100.000.000,00	
			Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	100,00 Persen			100,00 Persen							100,00 Persen		
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningkta tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan TDG	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STWP) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	-		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	1 Dokumen				1 Dokumen	20.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri															
		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri															
		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan SKA	1 Dokumen				1 Dokumen	25.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA															
		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen				1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	100,00 Persen			100,00 Persen	25.000.000,00						100,00 Persen	25.000.000,00	

	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola yang di bina	35 Orang			30 Orang	25.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	35 Orang	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	39,00 Persen			38,00 Persen	290.000.000,00						39,00 Persen	290.000.000,00	
			Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	100,00 Persen			100,00 Persen							100,00 Persen		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	42 Komoditi			42 Komoditi	30.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	42 Komoditi	30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia dan harga	42 Komoditi			42 Komoditi	215.000.000,00				-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	42 Komoditi	215.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	1 Dokumen			1 Dokumen	45.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	45.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan															
		Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi															

			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	3,22 Persen			2,94 Persen	200.000.000,00						3,22 Persen	200.000.000,00	
			Tingkat Nilai Ekspor bersih	1,00 Persen			1,00 Persen							1,00 Persen		
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran	1 kegiatan			1 kegiatan	200.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 kegiatan	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha			25 Pelaku Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	30 Pelaku Usaha	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Diusun Menjadi Materi Promosi	60 Produk			55 Produk	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	60 Produk	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 Persen			80,00 Persen	250.000.000,00						100 Persen	250.000.000,00	

	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	32500 Unit			26000 Unit	250.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	32500 Unit	250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	32500 Unit			26000 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	32500 Unit	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300 Orang			250 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	300 Orang	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	70,00 Persen			60,00 Persen	75.000.000,00						70,00 Persen	75.000.000,00	
			Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	70,00 Persen			60,00 Persen									
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Jenis produk UMKM yang di Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan di Kabupaten	40 Produk			30 Produk	75.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	40 Produk	75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM			15 UMKM	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	20 UMKM	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM			15 UMKM	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	20 UMKM	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1,	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	100,00 Persen			90,48 Persen	800.000.000,00						100,00 Persen	800.000.000,00	
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 Persen			80 Persen									
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3 kegiatan			3 kegiatan	800.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	3 kegiatan	800.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	1 Dokumen	600.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen			100 Persen	50.000.000,00						100 Persen	50.000.000,00	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen			100 Persen							100 Persen		
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen							100 Persen		
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	21,45 Persen			21,19 Persen							21,45 Persen		
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	-		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 Dokumen			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Diseminasi, publikasi data informasi dan analisis industri yang dilaksanakan	10 Kegiatan												

	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00				Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H							17.749.454.970,00								

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel T-C 34, sebagai berikut :

Tabel T-C 34

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						17.749.454.970,00							17.749.454.970,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.809.454.970,00							15.809.454.970,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						15.809.454.970,00							15.809.454.970,00	
1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat			A Predikat	13.836.837.074,00						A Predikat	13.836.837.074,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	173.437.230,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	7 Dokumen	173.437.230,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Purwakarta

												Publik				
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	23.437.230,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	23.437.230,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	10.228.325.676,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	3 Dokumen	10.228.325.676,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			12 Orang/bulan	10.208.325.676,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	14 Orang/bulan	10.208.325.676,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	165.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	165.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket				85.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-		85.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			5 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	5 Orang	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan			8 Kegiatan	1.075.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	8 Kegiatan	1.075.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	685.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	685.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan			2 Kegiatan	270.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Kegiatan	270.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	220.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan				3 Kegiatan	1.545.074.168,00	-		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	3 Kegiatan	1.545.074.168,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan				1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	53 Laporan				53 Laporan	1.290.074.168,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	53 Laporan	1.290.074.168,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan				4 Kegiatan	350.000.000,00	-		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Kegiatan	350.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit				7 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	7 Unit	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit				3 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			3 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.10.Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	3 Unit	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.10.Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Unit	150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2,	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	91,67 Persen			90,00 Persen	50.000.000,00						91,67 Persen	50.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan	55 Unit Usaha			45 Unit Usaha	50.000.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM	-	55 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	55 Unit Usaha			45 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM	-	55 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	90,05 Persen			89,80 Persen	195.000.000,00						90,05 Persen	195.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	507 Unit Usaha			506 Unit Usaha	195.000.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM	-	507 Unit Usaha	195.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	507 Unit Usaha			506 Unit Usaha	195.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng emban gan Koperasi dan UMKM	-	507 Unit Usaha	195.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4,	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	90,25 Persen			89,80 Persen	200.000.000,00						90,25 Persen	200.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang di nilai kesehatannya	507 Unit Usaha			506 Unit Usaha	200.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng emban gan Parwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	507 Unit Usaha	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	507 Unit Usaha			506 Unit Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng emban gan Parwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	507 Unit Usaha	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	18 Unit Usaha			15 Unit Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng emban gan Parwisata 4. Pengem ban gan Koperasi dan UMKM	-	18 Unit Usaha	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	74,60 Persen			73,71 Persen	471.370.000,00						74,60 Persen	471.370.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	170 Unit Usaha			160 Unit Usaha	471.370.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng emban gan Parwisata4. Pengem ban gan Koperasi dan UMKM	-	170 Unit Usaha	471.370.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	170 Orang			160 Orang	471.370.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	170 Orang	471.370.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	57,39 Persen			56,93 Persen	614.668.803,00						57,39 Persen	614.668.803,00	
			Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	3.85Persen			2.78 Persen							3.85Persen		
			Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	100Persen			86,45 Persen							100Persen		
			Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100Persen			92,24 Persen							100Persen		
			Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	63,22 Persen			60,42 Persen							63,22 Persen		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah fasilitasi UKM dalam pemberdayaan	920 Unit Usaha			830 Unit Usaha	614.668.803,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	920 Unit Usaha	614.668.803,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro															
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha			50 Unit Usaha	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	50 Unit Usaha	125.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro															
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	830 Unit Usaha			750 Unit Usaha	275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata 4. Pengem bangan Koperasi dan UMKM	-	830 Unit Usaha	275.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro															

			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembiayaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha			30 Unit Usaha	82.168.803,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM	-	40 Unit Usaha	82.168.803,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	40 Unit Usaha			30 Unit Usaha	82.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM	-	40 Unit Usaha	82.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	170 Orang			160 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM	-	170 Orang	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	11,50 Persen			10,56 Persen	441.579.093,00						11,50 Persen	441.579.093,00	
			Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	28,04 Persen			24,30 Persen							28,04 Persen		
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro dengan peningkatan menjadi usaha kecil	1605 Unit Usaha			1070 Unit Usaha	441.579.093,00	-		-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM	-	1605 Unit Usaha	441.579.093,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1605 Unit Usaha			1070 Unit Usaha	441.579.093,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM	-	1605 Unit Usaha	441.579.093,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.940.000.000,00							1.940.000.000,00	

	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						940.000.000,00							940.000.000,00	
1,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	97,86 Persen			96,53 Persen	100.000.000,00						97,86 Persen	100.000.000,00	
			Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	100,00 Persen			100,00 Persen					100,00 Persen				
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata S. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata S. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan TDG	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata S. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata S. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik														
		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri														
		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri														
		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri														

			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan SKA	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	-		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA															
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	100,00 Persen			100,00 Persen	25.000.000,00						100,00 Persen	25.000.000,00	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola yang di bina	35 Orang			30 Orang	25.000.000,00	-		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	35 Orang	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	39,00 Persen			38,00 Persen	290.000.000,00						39,00 Persen	290.000.000,00	
			Persentase komoditi Barang Kelutuban Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	100,00 Persen			100,00 Persen							100,00 Persen		

3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	42 Komoditi			42 Komoditi	30.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	42 Komoditi	30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia dan harga	42 Komoditi			42 Komoditi	215.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	42 Komoditi	215.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	1 Dokumen			1 Dokumen	45.000.000,00	-		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	45.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan														
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

4,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	3,22 Persen			2,94 Persen	200.000.000,00						3,22 Persen	200.000.000,00	
			Tingkat Nilai Export bersih	1,00 Persen			1,00 Persen							1,00 Persen		
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran	1 kegiatan			1 kegiatan	200.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 kegiatan	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha			25 Pelaku Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	30 Pelaku Usaha	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Diusun Menjadi Materi Promosi	60 Produk			55 Produk	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	60 Produk	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 Persen			80,00 Persen	250.000.000,00						100 Persen	250.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	32500 Unit			26000 Unit	250.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	32500 Unit	250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	32500 Unit			26000 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	32500 Unit	200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300 Orang			250 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	300 Orang	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	70,00 Persen			60,00 Persen	75.000.000,00						70,00 Persen	75.000.000,00	
			Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	70,00 Persen			60,00 Persen					70,00 Persen				
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Jenis produk UMKM yang di Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan di Kabupaten	40 Produk			30 Produk	75.000.000,00	-		-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	40 Produk	75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM			15 UMKM	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	20 UMKM	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM			15 UMKM	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	20 UMKM	25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
1,	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan bina kelompok pengrajin	100,00 Persen			90,48 Persen	800.000.000,00						100,00 Persen	800.000.000,00	

		INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 Persen			80 Persen										
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3 kegiatan			3 kegiatan	800.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	3 kegiatan	800.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	100.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	100.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	600.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen			100 Persen	50.000.000,00						100 Persen	50.000.000,00		

			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen			100 Persen								100 Persen	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen								100 Persen	
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	21,45 Persen			21,19 Persen								21,45 Persen	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 Dokumen			-	150.000.000,00							-	150.000.000,00
			Diseminasi, publikasi data informasi dan analisis industri yang dilaksanakan	10 Kegiatan												
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Pariwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINas														

			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Pengembangan Parwisata 5. Peningka tan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H							17.749.454.970,00								17.749.454.970,00

BAB V

PENUTUP

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Kaidah – kaidah

pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.